



Media: Radar

Hari: Selasa

Tanggal: 13 Juli 2021

Halaman: 1

Perketat Pengawasan Mobilitas Warga 24 Jam

PEMKOT Jogja berupaya melakukan pengetatan untuk meminimalisasi pergerakan warga selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat 3-20 Juli 2021.

Selain penyekatan, juga memperketat pengawasan terhadap pergerakan dan kegiatan masyarakat di sektor non-esensial dan non-kritikal.

► Baca **Perketat...** Hal 7

Sambungan dari hal 1

Wakil Wali Kota Jogja Heroe Poerwadi (HP) mengatakan, sampai saat ini sudah dilakukan penyekatan di berbagai macam tempat atau titik hingga mampu menurunkan kepadatan mobilitas warga mencapai 57 persen. Hanya masih diwanti-wanti justru banyaknya aktivitas di pinggiran atau perbatasan kota.

"Masih kita lihat di pinggir-pinggir kota masih banyak aktivitas," kata HP.

Ketua Harian Satgas Penanganan Covid-19 itu menjelaskan, saat ini yang sedang difokuskan adalah pengetatan pengawasan di beberapa ruas jalan selama 24 jam. Penyekatan di antaranya dilakukan di simpang Wirobrajan dari arah barat, simpang Pingit

ke selatan, simpang Tugu ke selatan, simpang Gejayan ke barat, dan simpang Muja Muju.

Sedangkan simpang Jalan Imogiri Barat dan Jalan Parangtritis menuju ke Kota Jogja, ditutup 24 jam. "Maka kami sedang memfokuskan pada pengetatan di beberapa penyekatan dengan 24 jam," ujarnya.

Di samping itu, pengawasan juga akan difokuskan pada kantor-kantor atau tempat usaha yang tidak patuh terhadap aturan PPKM Darurat. Baik sektor esensial maupun kritikal, apalagi non-esensial maupun non-kritikal yang masih buka. Pengawasan terhadap kegiatan masyarakat ini dilakukan melalui operasi gabungan Satpol PP bersama Polresta Jogja, Kodim 0734 dan Polisi Militer.

"Pasti kami nanti akan tegur langsung, kami minta mematuhi ketentuan yang ada. Ini nanti akan jadi fokus kita agar betul-betul memang mereka mentaati semua ini," jelasnya.

Dicontohkan, jika yang sektor non-esensial 100 persen *work from home* (WFH), maka akan diminta WFH. Sementara yang esensial 50 persen pekerja yang *work from office* (WFO) maka akan diminta mematuhi. "Kalau tidak, kami tutup. Kalau ada kasus positif di dalam kantor, kami minta untuk penutupan sementara," terangnya.

Selain itu, upaya lain juga akan memastikan PPKM mikro di tingkat RT, RW, kampung betul-betul efektif dijalankan. Tujuannya untuk mengurangi mobilitas masyarakat. (wia/laz/by)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas Perhubungan			
3. BPBD			
4. Sat Pol PP			

Yogyakarta, 10 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005